Radar Bali

Hibah Dewan Batal Dihabisi

Hanya Berkurang Rp116 M, Masih Rp 258 M

DENPASAR - Rencana pembangunan short cut titik 3 dan 4 ruas Singaraja-Denpasar yang dibiayai APBD Bali akhirnya bisa disepakati di DPRD Bali. Namun, rencana Wayan Koster agar biaya itu ditutup dengan memangkas dana hibah yang difasilitasi DPRD Bali tidak bisa dipenuhi sepenuhnya.

Setelah melalui pembahasan yang cukup alot dan deadlock pada Sabtu (25/8) lalu, seluruh fraksi DPRD Bali akhirnya menyepakati alokasi dana hibah yang difasilitasi anggota dewan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 258 miliar, Senin (27/8) kemarin. Angka ini lebih kecil dari dana hibah yang direncanakan sebesar Rp 374 miliar. Alias turun Rp116 miliar saja.

"Sudah ada titik temu. Seluruh fraksi sudah sepakat bahwa alokasi dana hibah yang difasilitasi anggota dewan sebesar Rp258 miliar," jelas Adi Wiryatama kemarin.

Adi Wiryatama merinci pemotongan dana hibah dewan itu dibutuhkan untuk pembangunan shortcut pada ruas Singaraja-Denpasar. Di luar shortcut yang dibiayai APBN, terangnya Gubernur Bali terpilih Wayan Koster menganggarkan alokasi dana sebesar Rp 250 miliar. Anggaran tersebut disepakati diambil sebagian dari alokasi dana hibah anggota Dewan yang nilai totalnya Rp 374 miliar.

> **"Sudah ada titik temu. Seluruh fraksi sudah sepakat bahwa alokasi dana hibah yang difasilitasi anggota dewan sebesar Rp258 miliar."**
>
> **NYOMAN ADI WIRYATAMA**
> *Ketua DPRD Bali*

Adi Wiryatama mengakui, dengan diambilnya Rp250 miliar dari dana hibah awal Rp374 miliar, maka hanya tersisa Rp 124 miliar. Untuk menutupi kekurangannya, agar genap Rp258 miliar, maka kekurangan sebesar Rp134 miliar akan ditutup dengan dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2018 maupun pendapatan daerah lainnya.

Adi menyebut kesepakatan yang dicapai tersebut patut diapresiasi. Sebab hal tersebut merupakan bukti komitmen DPRD Provinsi Bali secara kelembagaan untuk mendukung program prioritas Wayan Koster, Gubernur Bali terpilih hasil Pilgub 2018. "Kita mendukung rencana gubernur mempercepat upaya seimbangkan kawasan utara dan selatan Bali. Salah satunya terkait pembangunan shortcut, yang walaupun itu tanggung jawab pusat, tetapi kita ingin ada percepatan. Dan itu membutuhkan biaya Rp 250 miliar," pungkasnya.

Ditambahkannya selama ini Pemda Bali selalu berbicara ketimpangan ekonomi antara Bali Utara dan Selatan. Kegelisahan itu hanya "menguap" lewat kata-kata. "Apapun yang kita kerjakan di Singaraja bila shortcut, jalannya tetap sekian jam dari Tabanan ke Singaraja dan dari daerah lainnya juga lama, maka tidak ada artinya," terangnya sembari menyebut sudah ada titik temu antara Gubernur Bali terpilih dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Bali.

Sebagai tindak lanjut atas

Edisi : Selasa, 28 Agustus 2018
Hal : 4

Radar Bali

kata sepakat itu, Selasa (28/8) pukul 10.00 hari ini akan dilaksanakan penandatanganan KUA PPAS antara gubernur Made Mangku Pastika dan DPRD Bali. Dengan anggaran yang bekurang itu, maka dana hibah yang difasilitasi anggta DPRD Bali rata-rata berkurang menjadi sekitar Rp2 miliar dari sebelumnya sekitar Rp 4 miliar per orang. **(ken/yor)**

Berlangsung Panas

SITUASI panas sempat terjadi sebelum kata sepakat dicapai. Imbasnya, rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali dan pimpinan DPRD Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali yang dijadwalkan pukul 10.00 pagi molor hingga pukul 13.30.

Sebelum kata sepakat dicapai, Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Panca Bayu, yakni empat fraksi non-Fraksi PDIP, sempat menggelar rapat tertutup di ruang Fraksi Partai Golkar. Hasilnya, keempat fraksi ngotot bahwa alokasi dana hibah yang difasilitasi anggota dewan mentok di angka Rp374 miliar sesuai rancangan awal. Bahkan sempat terdengar skenario voting apabila eksekutif tetap ngotot memangkas dana hibah dari Rp374 miliar menjadi Rp 116 miliar.

Politisi NasDem Nyoman Tirtawan hingga berita ini dikorankan bahkan masih ngotot dengan kesepakatan yang dicapai. Ketua Fraksi Golkar I Wayan Gunawan juga meminta Pemprov Bali satya wacana (setia pada kata-kata, Red). Katanya, jangan ada kesan bahwa dana bansos membuat dewan mempersempit ruang aspirasi Gubenur Bali terpilih. "Kita ingin lembaga ini (DPRD Bali, red) terjaga. Kolektif kolegial," tandas Gunawan. Dirinya mengaku tidak berharap langkah voting dilakukan. Meski demikian bila kesepakatan tak tercapai maka tak ada pilihan lain. "APBD itu produk eksekutif dan legislatif. Tidak ada yang beradijaya," tegasnya. **(ken/yor)**

Edisi : _____

Hal : _____